

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Konsep ini mencerminkan paradigma baru yang menekankan pada peran serta masyarakat kesinambungan serta fokus pembangunan pada manusia. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternatif pembangunan yang merubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh setiap daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu daerah untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan kewajiban dan hak saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya (Suhendra, 2006: 75).

Bangka belitung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai potensi alam yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas terutama bagi masyarakat pedesaan. Salah satu kawasan yang mempunyai potensi dan dapat dikembangkan menjadi kawasan wira usaha yaitu masyarakat di kaki Bukit Maras Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka khususnya Desa Pangkal Niur, desa ini memiliki berbagai potensi sumber daya alam salah satunya ubi. Ubi yang ditanam dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk pertumbuhan ekonomi, memanfaatkannya dengan diolah diproduksi sebagai bahan pangan lokal, misalnya berupa beras aruk.

Potensi desa dapat dilihat dari segi kenampakannya yang berupa potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik meliputi tanah, air, iklim, cuaca, flora dan fauna. Potensi non fisik meliputi masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial desa dan aparatur desa, begitu banyak potensi yang dapat ditemukan di Desa Pangkal Niur. Potensi tersebut tentunya dapat dikembangkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya potensi pertanian serta potensi lainnya. Salah satu potensi pertanian yaitu berupa beras aruk, beras yang terbuat dari ubi yang kemudian diolah menjadi beras dan bisa dijadikan makanan pokok masyarakat setempat maupun masyarakat luar. Masyarakat luar dimaksud adalah masyarakat yang berada pada luar daerah desa pengonsumsi makanan beras aruk, karena ubi yang diolah menjadi beras aruk juga diperjual belikan. Namun terkadang masyarakat beranggapan negatif terhadap mereka yang mengonsumsi makanan tersebut.

Fenomena yang berkembang dimasyarakat, mereka yang mengkonsumsi makanan pokok selain beras kerap kali diidentikkan dengan golongan masyarakat yang serba kekurangan. Misalnya untuk menggantikan beras, mereka mengkonsumsi ubi dan lain-lain yang sejenis. Serta merta kelompok masyarakat demikian itu dikelompokkan sebagai masyarakat miskin. Tentunya persepsi seperti itu dapat menyesatkan karena pada gilirannya akan mengaburkan nilai makanan non beras di mata masyarakat awam karena kenyataan makanan jenis non beras belum tentu tidak memiliki kandungan nutrisi sebaik beras.

Khususnya di Bangka bukan suatu hal yang tidak mungkin suatu saat akan terjadi krisis bahan pangan, namun masyarakat belum siap untuk menanggulangi hal tersebut. Beras aruk salah satu solusi yang paling tepat untuk mengatasi hal tersebut. Karena dengan beras aruk masyarakat bisa memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan bisa juga dijadikan untuk kebutuhan pemerintah desa dalam membangun desa. Dalam arti kebutuhan untuk bahan perkembangan desa, karena ini merupakan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Namun ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya potensi, mereka tidak peduli dengan hal itu, padahal potensi yang mereka punya sangat banyak manfaatnya.

Sesuai kebijaksanaan pembangunan sektor pertanian dan program peningkatan ketahanan pangan salah satu yang ditempuh adalah dengan memanfaatkan sumber-sumber pangan yang ada yaitu dengan meningkatkan pengembangan pangan lokal yang mengarah pada perbaikan konsumsi pangan

penduduk, baik jumlah maupun mutu termasuk keragaman dalam mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman.

Tidak dapat dipungkiri banyak daerah yang sumber daya alamnya tidak terlalu menjanjikan, akan tetapi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, bisa menjadi daerah yang maju atas hasil sektor jasa. Misalnya dengan mendapatkan hak paten atas suatu produk yang secara tradisional justru berasal dari daerah lain, dalam membuat kerja sama menunjukkan bahwa daerah tersebut mempunyai posisi tawar tinggi.

Penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan produk beras aruk di Desa Pangkal Niur. Konsep pemberdayaan hampir menjadi agenda kerja setiap pemerintah. Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah desa yang menaungi satuan kerja masyarakat paling terkecil. Munculnya konsep pemberdayaan berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, berkaitan dengan hal tersebut, maka hal itu dikeluarkan oleh pemerintah sebagai umpan untuk mensejahterakan masyarakat, maka dari konsep yang ditawarkan, masyarakat mampu mandiri dan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk pengembangan produk beras aruk?
2. Apa kendala dan dukungan dalam pengembangan produk beras aruk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana peran pemerintah untuk membantu masyarakat Desa Pangkal Niur dalam mengembangkan produk beras aruk
2. Mendeskripsikan permasalahan yang terjadi dalam mengembangkan produk beras aruk

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkuat kajian teoritis tentang pengembangan produk beras aruk dalam ilmu-ilmu sosial yang fokus kajiannya mengenai pemberdayaan masyarakat.
 - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pembelajaran tentang pengembangan produk di pedesaan dalam upaya mengembangkan potensi sumber daya alam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
1. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi masyarakat untuk berfikir untuk mengembangkan potensi sumber daya alam, dan menjadi acuan atau panduan bagi pemerintah dalam memberikan sosialisai tentang pengembangan potensi sumber daya alam

- b. Sebagai penyemangat bagi masyarakat setempat dalam mengelola atau mengembangkan potensi-potensi untuk meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi
- c. Baik antar warga yang ada di desa maupun lembaga pemerintahan untuk saling bekerjasama demi perubahan yang terus membaik dan bersinergi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Hal ini diperlukan karena fungsinya sebagai tinjauan yang memuat rangkuman dan uraian yang ditemukan dalam buku-buku ilmiah, artikel dan jurnal. Tinjauan pustaka juga sebagai pembanding antara penelitian terdahulu dengan apa yang sedang diteliti.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Pipin Hanapiah pada 5 juni 2004 di Sukabumi, sama halnya dengan yang peneliti lakukan, ia meneliti tentang pemberdayaan, dengan judul Pemberdayaan Potensi dan Peluang Pembangunan di Desa. Ia mengatakan dalam merumuskan aspirasi masyarakat desa, banyak pihak yang dapat dijadikan mitra-kerjasama. Antara desa yang satu dengan yang lainnya, terdapat perbedaan baik dalam jumlah, jenis, maupun bentuk aspirasinya. Desa-desa yang terpencil dengan desa-desa yang terdekat bahkan berada diwilayah pusat perkotaan/pemerintahan memiliki perbedaan hal tersebut.

Di desa-desa terpencil, pada umumnya, yang masyarakatnya relatif lebih bersifat homogen, paternalistik, dan paguyuban, pihak-pihak yang dapat

dijadikan mitra untuk kerjasama sebagai sumber/bahan aspirasi relatif lebih sedikit jumlah dan jenisnya. Pihak-pihak itu misalnya, bila mayoritas masyarakat suatu desa itu bermata pencaharian bertani, maka pihak itu adalah para petani atau kelompok petani, atau tokoh masyarakat yang bertani. Aspirasi mereka tidak jauh dari bagaimana agar hasil taninya berlimpah, harga pupuknya terjangkau, airnya mengalir, terhindar dari hama, padinya dapat dijual dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya, dan mendapatkan rupiah berlebih dari ongkos bertani yang sisanya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Selain mereka, pihak-pihak lainnya bisa berupa tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, perkumpulan olahraga, perkumpulan kesenian, tokoh pendidik, dan sebagainya. Begitu pula bagi desa-desa yang masyarakatnya beternak, berkebun, nelayan, dan sebagainya. Desa-desa yang dekat dengan pusat perkotaan/pemerintahan atau bahkan desa-desa yang berada di wilayah perkotaan, aspirasi masyarakatnya relatif lebih banyak dan beragam (kompleks). Pihak-pihak yang dapat dijadikan mitra-kerjasama dapat bertambah. Mereka di antaranya adalah para tokoh yang terdapat pada berbagai parpol, berbagai ormas kepemudaan, berbagai agama, berbagai aliran-aliran pemahaman dalam seagama, berbagai pendidik, berbagai LSM, masyarakat usaha di pasar, masyarakat usaha di pertokoan, para petani, para buruh, para pelajar, para mahasiswa, para pegawai negeri sipil, para anggota TNI, perkumpulan masyarakat dari beberapa daerah/etnis, dan sebagainya. Ini semua akan berakibat pada banyak dan beragamnya aspirasi masyarakat

masing-masing yang selain banyak persamaannya terdapat juga banyak perbedaannya.

Dalam merumuskan aspirasinya pun sudah jelas memerlukan teknik teknik yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok masyarakat desa tersebut. Itu semua memerlukan kemampuan dan kemauan Kepala Desa, Perangkat Desa, para Anggota BPD, dan para Tokoh Desa (baik Tokoh Agama, Tokoh Budaya atau Pendidikan, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Informal) untuk secara proaktif merumuskannya. Penelitian ini lebih kepada karakteristik dan aspirasi pada kelompok-kelompok masyarakat.

Kemudian adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang executive bernama Summary pada tahun 2011 di Jakarta, yang meneliti tentang pemberdayaan, dengan judul Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Dalam penelitiannya ia menjelaskan bagaimana mengembangkan pelaksanaan pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, sehingga mekanisme pemberdayaan berjalan dengan optimal.

Dari hasil penelitiannya tersebut ia melihat permasalahan dari segi input keuangan, tenaga, teknologi, nilai-nilai, motivasi, dukungan kebijakan, dan tujuan. Dilihat dari segi input keuangan, aspek keuangan memberikan gambaran masih bertumpunya masyarakat pada alokasi kegiatan infrastruktur. Kelancaran proses pencairan dana perlu diperhatikan karena berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Terjadinya kekeliruan dalam penganggaran kegiatan juga perlu dihindari, sehingga tidak terjadi kasus

pemblokiran/tanda bintang. Masyarakat menilai alokasi dana untuk program dan bantuan dana dari pemerintah, masih kurang. Ketersediaan sumber daya manusia yang berasal dari penduduk lokal, secara umum belum memadai. Hal ini dikaitkan dengan kemampuan/keahlian, dan jumlah SDM lokal. Secara umum lokasi PNPM Mandiri Perkotaan masih mengandalkan tenaga fasilitator kelurahan yang disediakan program.

Pada aspek penggunaan teknologi dapat dilakukan dengan mendorong pelatihan membuat bahan bangunan dan penggunaan teknologi tepat guna oleh KSM sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara umum penggunaan teknologi tepat guna belum nampak pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Dibandingkan dengan penerapan dari aspek yang lain dari input kegiatan, penggunaan teknologi merupakan aspek yang sangat kurang dibandingkan yang lain, persepsi ini dikemukakan baik oleh masyarakat maupun pengelola. Dari aspek nilai-nilai ditemukan bahwa, perlu lebih mendorong peran keterlibatan perempuan, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga. Masyarakat masih melihat penerapan kesetaraan gender PNPM MP perlu ditingkatkan. Masyarakat menilai manfaat PNPM dapat dirasakan sampai 5 tahun kedepan (prinsip keberlanjutan). Pengelola memiliki persepsi prinsip musyawarah mufakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat miskin dapat berjalan. Terjadi perbedaan pandangan terhadap yaitu prosedur, aturan, dan mekanisme PNPM bagi penerima manfaat sederhana sedangkan bagi pengelola kurang sederhana. Prioritas kegiatan

PNPM yang utama adalah mengentaskan kemiskinan dan berpihak pada masyarakat miskin dalam input kegiatan.

Pada aspek motivasi terlihat peran tokoh masyarakat dan kepala daerah menjadi aspek penting menentukan keberhasilan input kegiatan karena dapat menggerakkan masyarakat penerima manfaat. Dorongan motivasi dari pemangku kepentingan PNPM ditunjukkan dengan adanya pembagian wewenang dalam penanganan masalah sosial ekonomi. Adanya dukungan kebijakan dapat menstimulasi dana-dana pendukung kegiatan pemberdayaan, menjadikan dana pemberdayaan dapat menjadi prioritas anggaran daerah, memunculkan modifikasi PNPM yang menghasilkan sinergi antar pemangku kepentingan, apresiasi pemerintah daerah untuk melanjutkan program dengan menggunakan APBD. Pengelola menganggap sudah cukup baik dukungan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan PNPM MP. Pengelola PNPM melihat dukungan kebijakan dari pemerintah (pusat dan daerah) merupakan prioritas terpenting kedua.

Pencapaian tujuan PNPM dilakukan dengan mengintensifkan pertemuan formal dan informal, menyadari bahwa penanggulangan kemiskinan harus menjadi satu kesatuan, menjadi persoalan bersama, penyadaran akan kondisi diri, perlu untuk menyampingkan perasaan gengsi baik pada pengelola dan masyarakat penerima manfaat. Hal ini perlu diperhatikan mengingat, kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan masyarakat adalah hal terpenting dalam input kegiatan. Hal yang dinilai paling kurang penting adalah penggunaan teknologi dalam program dan prinsip kesetaraan gender serta prinsip

desentralisasi. Aspek-aspek yang dianggap belum baik adalah teknologi, kesetaraan gender, keuangan, prinsip desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, prinsip pembangunan SDM, prioritas, kolaborasi, otonomi, partisipasi, dan tenaga serta motivasi.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Riany Andini pada bulan Mei 2014 di Bangka Belitung, yang meneliti tentang pemberdayaan dengan judul Peran Legislator Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan, dalam penelitiannya ia membahas tentang bagaimana peran pemberdayaan perempuan oleh anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil penelitiannya dijelaskan bahwa peran pemberdayaan yang dilakukan anggota legislatif perempuan terhadap perempuan terbagi ke dalam 3 bentuk yaitu dengan melakukan perencanaan kebijakan, aksi politik dan sosial, peningkatan kesadaran. Perencanaan kebijakan yang didasarkan atas aspirasi perempuan sebagai konstituen yang diwakili. Sedangkan, aksi sosial dan politik yang dilakukan melalui PKK dilingkungan mereka dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh perempuan dan menemukan solusinya. Aksi sosial juga dijadikan ajang koordinasi antara anggota legislatif perempuan dengan perempuan yang diwakili, sekaligus didalam aksi sosial dilakukan peningkatan kesadaran terhadap hak dan kewajiban perempuan baik di ranah privat dan publik.

Peran pemberdayaan yang dilakukan oleh anggota legislatif tidak ada terlihat tidak satupun peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam mengatasi permasalahan kaum perempuan, ditinjau dari segi anggaran untuk

perempuan juga tidak ada anggaran bagi pemberdayaan perempuan yang mereka tawarkan dalam pembahasan anggaran di legislatif. Peran pemberdayaan ini tidak ada juga didasari atas kurangnya kompetensi dari perempuan yang duduk dilembaga legislatif, dengan kompetensi yang kurang membuat legislator perempuan yang ada menjadi tidak mampu bersaing dengan kaum laki-laki di parlemen.

Selain itu, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh masing-masing anggota dewan perempuan untuk berada di tengah konstituen perempuan ini bisa kita lihat dari dua dari anggota legislator perempuan berdomisili di Jakarta yang merupakan bukan daerah pemilihan yang mereka wakili sehingga dalam menyerap aspirasi pun menjadi sangat baik tidak maksimal. Faktor lain yang juga menghambat peran pemberdayaan perempuan oleh legislator perempuan dalam melegalkan kebijakan didalam lembaga legislatif ialah jumlah perempuan yang sedikit, sedangkan pengesahan kebijakan didasarkan pada suara terbanyak dalam rapat paripurna yang mana didominasi oleh kaum laki-laki. Seharusnya peran pemberdayaan menjadi tugas semua elemen yang berada dalam masyarakat untuk memajukan perempuan.

Sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang menggambarkan bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan produk beras aruk, dan apa saja kendala dan dukungan pemerintah desa dalam pengembangan produk beras aruk tersebut.

F. Kerangka Teoritis

Berangkat dari permasalahan penelitian, penulis bermaksud menganalisis proses terjadinya pemberdayaan masyarakat Desa Pangkalniur dalam pengembangan produk beras aruk. Sebelum peneliti menjabarkan teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini, peneliti bermaksud ingin menjelaskan beberapa kata dan beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli yang mungkin belum dijelaskan sebelumnya yaitu:

Peran lembaga-lembaga pemerintah adalah peran yang dimainkan beberapa orang sebagai pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam hal ini mengesahkan kebijakan, merancang undang-undang yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat terutama menampung aspirasi dari konstituen yang sudah memilih. Selain itu lembaga-lembaga pemerintah juga memiliki tanggung jawab peran yang harus dilakukan ketika mereka berada ditengah masyarakat untuk mendorong kemajuan dalam semua sektor yang ada seperti potensi sumber daya alam. Kebijakan adalah keputusan yang sudah dihasilkan oleh lembaga pemerintah, dalam hal ini pemberdayaan sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara dan tata dunia didalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradap, diberbagai medan kehidupan yakni bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan lain sebagainya. Konsep empowerment atau pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradap menjadi semakin efektif secara struktural, baik didalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional,

internasional maupun dibidang politik, ekonomi dan lain-lain (Priyono dalam Andini, 2014: 14)

Menurut Oakley dan Marsden dalam Priyono sebagaimana yang dikutip oleh Andini (2014: 14) menyatakan proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan pada masyarakat agar individu lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian. Kecenderungan atau proses yang pertama tadi dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan, kedua apa yang disebut dengan kecenderungan sekunder kecenderungan ini menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi diri agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu : pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memberdayakan masyarakat akan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langka lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Kemudian yang ketiga, memberdayakan mengandung arti

melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat (Totok dan Soebiato, 2012: 30).

Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan (Totok dan Soebiato, 2012: 44)

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk :

- a. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
- b. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha

pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swfit dan Levin dalam Totok dan Soebiato, 2012: 28).

Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Rappaport dalam Totok dan Soebiato, 2012: 29).

Pemberdayaan juga diartikan sebagai sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhinya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons dalam Totok dan Soebiato, 2012: 29)

Menurut Subejo dan Narimo dalam Totok dan Soebiato (2012: 32) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *colective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka dalam Totok dan Soebiato (2012: 51) manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar

mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditunjukkan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Menurut Sumodiningrat dalam Totok dan Soebiato (2012: 52) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Mubyarto (1998) menekankan bahwa pemberdayaan terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Menurut Hogan dalam Adi Isbandi Rukminto sebagaimana yang dikutip oleh Andini (2014: 15) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama yaitu,

- a.) Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall powering/empowering experiences*).
- b.) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penindakterdayaan (*discuss reason for depowerment*).
- c.) Mengidentifikasi suatu masalah (*identify one problem*).
- d.) Mengidentifikasi basis daya bermakna untuk melakukan perubahan (*identity useful power bases*).
- e.) Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

Menurut Hogan bahwa proses pemberdayaan yang terjadi tidaklah terhenti pada satu titik tertentu, tetapi lebih kepada upaya yang berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan daya.

Berdasarkan pemaparan beberapa teori di atas penulis sendiri menggunakan teori pemberdayaan untuk menganalisis masalah. Teori pemberdayaan yang digunakan adalah teori pemberdayaan Hogan, yang mengatakan bahwa proses pemberdayaan lebih kepada yang berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan daya. Daya dimaksud merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ataupun masyarakat yang kemudian tidak terhenti pada satu titik, karena akan berkelanjutan pada masa yang akan datang. Pemberdayaan dilakukan berdasarkan pengalaman dan mengetahui cara membedakan memberdayakan dan tidak memberdayakan, kemudian membicarakan bagaimana proses terjadinya pemberdayaan dan tindakan yang dilakukan, mengetahui permasalahan yang ada, mengetahui bahwa masyarakat mempunyai kemampuan yang lebih dan mengembangkan sebuah rencana-rencana yang telah dibuat serta mempraktikkannya pada suatu tindakan.